

## ABSTRAK

Tingginya persaingan usaha untuk mencari laba sebesar-besarnya merupakan faktor pendorong seseorang melakukan suatu kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha. Setiap kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan biasanya menggunakan kendaraan bisnis yang dinamakan perusahaan, namun dalam dunia bisnis selalu penuh dengan perkembangan yang memerlukan respon dan pengambilan keputusan yang segera, sehingga dapat mengantisipasi perubahan itu. Salah satu bentuk perubahan itu adalah apabila suatu bisnis yang sebelumnya berbentuk badan usaha Perseroan Komanditer (CV) akan dirubah statusnya menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Perbedaan prinsipil antara Perseroan Komanditer atau dikenal dengan sebutan CV (*Commanditaire vennootschap*) dengan Perseroan Terbatas (PT) terdapat pada status badan hukumnya, karena CV merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum dan tanggungjawab dari para sekutu pengurus hanya sampai kepada harta pribadinya. Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan perseoran berbadan hukum dan tanggungjawabnya terbatas. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis mekanisme perubahan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Untuk menganalisis Tanggung Jawab Sekutu Komplementer Terhadap Perseroan Terbatas (PT) Yang Didirikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa Prosedur pengalihan asset dari CV kepada PT harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PT. Langkah pertama pengalihan asset tersebut adalah dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan para persero dalam pengalihan asset dari CV kepada PT sebagaimana diketahui dalam PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar PT. Persekutuan Komanditer atau CV, meskipun memiliki anggota aktif/sekutu aktif anggota pasif/komanditer, tetap terdapat kelemahan-kelemahan dan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan CV tersebut maka harus diambil solusi yaitu salah satunya dengan cara melakukan perubahan Perseroan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Hal ini dikarenakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut, secara yuridis kedudukan PT semakin memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan pasti dibandingkan dengan CV.

**Kata Kunci:** Badan Usaha, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas

## **ABSTRACT**

*The high business competition to seek maximum profit is a driving factor for someone to do a business activity by establishing a business entity. Every business activity or business that is run usually uses a business vehicle called a company, but in the business world it is always full of developments that require immediate response and decision making, so that it can anticipate that change. One form of change is that if a business that is previously a business entity of the Joint Venture Company (CV) will be changed its status to a legal entity Limited Liability Company (PT). The principal difference between the Company Commander or known as the CV (Commanditaire vennootschap) with Limited Liability Company (PT) is in the status of its legal entity, because CV is a partnership that is not incorporated and the responsibilities of allies of management only reach their personal assets. Whereas a Limited Liability Company (PT) is a legal entity and its responsibilities are limited. The purpose of this study is to examine and analyze the mechanism of change of the Communal Alliance (CV) into a Limited Liability Company (PT). To analyze Complementary Allied Responsibilities of Limited Liability Companies (PT). The research method used is normative legal research, namely research that examines principles and legal principles, data collection is done using primary data and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as the main data. After the secondary and primary data are collected, an analysis is carried out qualitatively. Based on the results of data analysis it was concluded that the procedure for transferring assets from CV to PT must be in accordance with the provisions of the laws and regulations that apply in the field of PT. The first step of the asset transfer is by holding a General Meeting of Shareholders (GMS) to seek approval from the Persero in transferring assets from CV to PT as known in PT, the GMS is a corporate organ that has authority not given to directors or board of commissioners within the limits determined in PT Law No. 40 of 2007 and / or the articles of association of PT. Commander Association or CV, even though it has active members / active allies of passive members / commanders, there are still weaknesses and to overcome the weaknesses of the CV, a solution must be taken, one of them is by making changes to the Limited Liability Company (CV) ( PT). This is due to the existence of Law Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company, the juridical position of PT increasingly has a clearer and more definite legal basis compared to CV.*

**Keywords:** *Business Entity, Commander Association, Limited Liability Company*